Copyright © the author(s)
Jurnal Sinestesia, Vol. 13, No. 1, 2023

Penguatan Pendidikan di Masyarakat Melalui Vitalisasi Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

Fatmaridah Sabani [1]*, Ilma Latifatul Lutfia [2]

[1–2] Institut Agama Islam Negeri Palopo

* fatmaridah.sabani@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) belum mampu mendorong terjadinya akselerasi pembangunan masyarakat sebagaimana dengan lembaga pendidikan formal yang telah terselenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) pelaksanaan pendidikan non formal di Kota Palopo, 2) upaya pemerintah kota Palopo dalam melakukan penguatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal, dan 3) hambatan di dalam pelaksanaan pendidikan non formal serta upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (exploratory) dengan pendekatan kualitatif (field study). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palopo. Penelitian ini secara garis besar meliputi tiga langkah, yaitu: persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Untuk analisis data dilakukan triangulasi data. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa; 1) pemerintah daerah kota Palopo memfasilitasi terbentuknya beberapa lembaga pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar masyarakat, lembaga klursus, Kelompok Belajar serta Taman Pendidikan. 2) Upaya pemerintah kota Palopo dalam melakukan penguatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dapat dilihat dari proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui dinas pendidikan kota Palopo. 3) Secara umum, pelaksanaan pendidikan nonformal di kota Palopo berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *vitalisasi pendidikan, pendidikan non formal*

Pendahuluan

Pendidikan non formal sebagaimana pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang keberadaanya diatur oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Urgensi pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal (Masnuah dkk., 2022; Yahya, 2017).

Dewasa ini, perhatian pemerintah terhadap pendidikan formal begitu kuat dan nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika pendidikan formal yang terus berkembang melalui sekolah formal. Indikator lainnya adalah dinamika kurikulum yang relatif berubah, berkembang dan mendapatkan perhatian pemerintah dan banyak pihak (Ariandy, 2019; Fadhli, 2020; Hasriadi, 2022b). Tetapi bagaimana dengan ranah lingkungan pendidikan lainnya, Informal dan non formal?

Pendidikan diyakini sebagai kebutuhan setiap insan dan menjadi instrument penting bagi pembangunan manusia (Hasriadi, 2022a). (Latif, 2020; Yaqin, 2021) menyatakan bahwa agenda utama pembangunan manusia adalah pertama: pendidikan, kedua: pendidikan dan ketiga: Pendidikan, menyusul agenda selanjutnya adalah pembangunan ekonomi, politik,

hukum, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan pentingnya pembangunan pendidikan yang seutuhnya bagi setiap bangsa di seluruh belahan dunia.

Pendidikan yang utuh adalah pendidikan yang terselenggara di seluruh lingkungan pendidikan; formal, informal dan non formal, sebagai satu kristalisasi yang tidak dapat dipisahkan. Seyogyanya perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada pendidikan formal semata, tetapi juga memberikan porsi yang seimbang dengan bentuk pendidikan lainnya, termasuk pendidikan non formal (Darlis, 2017; Elihami & Firawati, 2017; Sodikin, 2019).

Keberadaan pendidikan non formal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi bentuk pendidikan lainnya, seperti pendidikan informal dan pendidikan formal (Mustangin, Akbar, dkk., 2021). Pendidikan non formal merupakan salah satu pilar pendidikan yang menopang kelangsungan pendidikan nasional (A. Muslim, 2022). Sebagai salah satu bentuk pendidikan, maka pendidikan non formal harus dipahami dengan baik, sehingga di dalam pelaksanaannya mudah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkannya. Kategorisasi ini penting untuk melihat keberadaan lembaga pendidikan non formal secara utuh.

Keberadaan pendidikan non formal di Indonesia lebih banyak di selenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah melalui berbagai kegiatan pendidikan seperti kursus-kursus, maupun pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (Mustangin, Iqbal, dkk., 2021). Beberapa kegiatan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, tampaknya belum begitu popular di kalangan masyarakat. Demikian juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(LPMK) belum mampu mendorong terjadinya akselerasi pembangunan masyarakat sebagaimana dengan lembaga pendidikan formal yang telah terselenggara (Darlan, 2018; Sunaiyah, 2022).

Rancangan penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa satu-satunya upaya untuk membangun masyarakat bangsa adalah melalui pendidikan. Namun pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada ranah pendidikan formal semata, tetapi juga harus dilakukan penguatan terhadap ranah lain lingkungan pendidikan yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal. Salah satu yang menjadi sorotan peneliti adalah pendidikan non formal.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif *(exploratory*) dengan pendekatan kualitatif (*field study*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palopo, yang meliputi beberapa kecamatan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan data penelitian yang relevan. Beberapa informan yang relevan dengan kebutuhan data yang akan diolah meliputi: penangung jawab di beberapa sentra kegiatan pendidikan non formal, penggiat kegiatan pendidikan non formal, pelaksana pendidikan non formal di tingkat birokrat, serta masyarakat yang menjadi peserta kegiatan pendidikan non formal.

Penelitian ini memiliki tiga langkah dasar: persiapan data, tabulasi, dan inplementasi dengan metodologi penelitian. Untuk analisis data dilakukan triangulasi data. Triangulasi menggunakan banyak metode untuk mengeksplorasi peristiwa terkait dari berbagai sudut pandang. Menurutnya, triangulasi terdiri dari empat komponen, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori, berupa rumusan informasi atau pernyataan tesis, hasil penelitian kualitatif. Informasi ini kemudian diperiksa dengan sudut pandang teoretis yang relevan untuk menghilangkan bias peneliti dalam hasil atau kesimpulan.

Hasil

Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan non formal di kota Palopo secara operasional mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palopo. Komitmen pemerintah untuk mendorong penyelenggaraan pendidikan formal tentu saja harus dibuktikan dari upaya pemerintah menggalakkan dan menggiatkan pendidikan non formal di kota Palopo. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam kesempatan wawancara mengemukakan bahwa "pendidikan non formal sama pentingnya dengan pendidikan formal dan informal. Melalui pendidikan non formal, kalangan masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan formal, dapat menempuh jalur pendidikan formal dan akan mendapatkan fasilitas pendidikan dari pemerintah. Misalnya program kelompok belajar (Kejar) paket A, Kejar paket B dan kejar Paket C. Dengan demikian, tidak aka nada masyarakat di kota Palopo yang tertinggal di bidang pendidikan.

Pengembangan Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

Melihat banyaknya lembaga pendidikan non formal yang ada di kota Palopo, maka dapat dikatakan bahwa misi pembangunan pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah memiliki potensi yang besar untuk dicapai. Ini berarti bahwa penguatan masyarakat melalui pendidikan non formal dapat terwujud. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sulawesi selatan maka kota palopo berkembang menjadi kota yang menjadi sasaran kedatangan warga masyarakat dari daerah sekitarnya, termasuk kedatangan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan misi yang tertuang dalam dimensi kota palopo sebagai kota pendidikan.

Menarik untuk dicermati bahwa dengan jumlah partisipasi pendidikan masyarakat untuk pendidikan formal yang besar, diikuti dengan lembaga-lembaga pendidikan non formal yang cukup banyak justru peran pemerintah tidak terlalu besar dalam pengembangan pendidikan nonformal tersebut, jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Hasil penelusuran peneliti, menemukan fakta bahwa data sidang pembahasan tentang pendidikan di DPRD Kota Palopo tahun 2013 hanya menghasilkan sebuah Perda yaitu Perda No.2 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Palopo. Bahkan di Tahun 2012 tak satupun Perda yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palopo terkait dengan pendidikan. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak peduli dengan pendidikan. Di tahun 2015, pemerintah daerah justru berhasil mencanangkan program pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas.

Hambatan dalam Pengembangan Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

Kendala terbesar yang dihadapi oleh kota Palopo di dalam upaya mengembangkan pendidikan non formal adalah dari sisi aspek kontinuitas dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, masih minimnya anggaran untuk pendidikan non formal menjadi salah satu kendala pokok.

Seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan di kota Palopo diambil dari Anggaran Daerah yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan pendidikan termasuk pendidikan non formal. Seperti diketahui bahwa pendapatan Asli Daerah Kota Palopo mencapai Rp. 869

Miliar. Realisasi pendapatan daerah di triwulan ke III itu yakni: Pendapatan Asli Daerah (79,01%) = Rp 67.423.987.114 dari Target = Rp 85.337.454.367 Dana Perimbangan (72,20%) = Rp469.281.581.284 dari target = Rp 650.699.537.000 Lain-lain pendapatan (88,57%) = Rp 117.836.060.030,93 dari target = Rp 133.035.906.911. Jika merujuk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang besaran alokasi dana pendidikan sebesar 20 %, maka alokasi dana pendidikan untuk kota Palopo adalah sebesar Rp.173.800.000.000.

Pembahasan

Sebagai pengganti, penambah dan sebagai alternatif pendidikan, maka di kota Palopo terdapat beberapa bentuk kegiatan pendidikan formal. Hal ini juga mengacu pada Perda no. 2 tahun 2013. Selain itu, masalah pendidikan di sekolah mendorong pendidikan nonformal untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut. Komponen pendidikan nonformal yang digambarkan Sudjana sebagai "pelengkap, tambahan, dan pengganti" adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah

Pendidikan nonformal menambah bakat siswa dengan memberi mereka kesempatan belajar yang tidak tersedia dalam pendidikan tradisional. Masyarakat merasa bahwa pendidikan nonformal sebagai pelengkap diperlukan untuk menjawab tuntutan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan realitas masyarakat. Dengan demikian, program pendidikan nonformal, seperti pengajaran pertukangan kayu, tukang batu, pengelasan, pertanian, pangan, dan keterampilan lainnya, seringkali dikaitkan dengan pekerjaan dan sektor bisnis (Wijoyo, 2021).

Menurut Mustami, M.Pd., pendidikan nonformal seperti kelompok belajar (Kejar Paket B) sangat membantu masyarakat yang mengalami putus sekolah. Keberadaan kelompok belajar seperti itu akan mendorong terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan di masyarakat. Dengan demikian, kontinuitas pendidikan yang terputus di masyarakat dapat terwujud kembali, melalui program pendidikan non formal yang diprogramkan.

2. Sebagai penambah pendidikan sekolah

Sebagai pelengkap pendidikan formal, pendidikan nonformal berupaya untuk menawarkan kesempatan belajar bagi (1) Peserta didik yang ingin mendalami lebih jauh materi pelajaran tertentu yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam program pendidikan berbasis sekolah. (2) Alumni sekolah yang masih membutuhkan layanan pendidikan untuk menambah pengetahuannya. (3) Individu yang putus sekolah membutuhkan informasi dan kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan dan penampilan diri (A. Q. Muslim & Suci, 2020; Puspito dkk., 2021).

Beberapa lembaga pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah pendidikan sekolah, misalnya lembaga-lembaga kursus. Di Kota Palopo lembaga kursus banyak menyebar di beberapa tempat, mulai dari kursus bahasa asing, hingga kursus menjahit dan kursus mengemudi kendaraan. Menurut Jamal Nasser, keberadaan lembaga kursus tersebut sangat membantu warga di dalam memberdayakan masyarakat sehingga warga masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.

3. Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan sekolah memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang tidak berkesempatan memasuki satuan pendidikan sekolah karena berbagai alasan (Wandani & Santi, 2020). Kegiatan belajar mengajar memberikan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang penting dan pengetahuan praktis dan spesifik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti perawatan kesehatan lingkungan dan perumahan, nutrisi keluarga, pertumbuhan tanaman, dan kerajinan lainnya.

Di Kota Palopo terdapat beberapa sentra kegiatan pendidikan non formal, di antaranya lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta kelompok belajar. Data yang dihimpun oleh peneliti menunjukkan bahwa di Kota Palopo, untuk pendidikan nonformal, 38 lembaga PAUD, 38 Kelompok Bermain, 3 lembaga SPS, sembilan Program Paket A, 24 Paket B, dan tujuh kelompok Paket C saat ini beroperasi dan terdaftar delapan puluh tiga kelompok program keaksaraan fungsional, delapan kelompok lembaga, dan 29 organisasi PKBM. Warga Kota Palopo hampir sepenuhnya mendominasi pendidikan nonformal ini, selain lembaga kursus. Di lembaga kursus, rasio peserta didik warga palopo dan bukan warga palopo hampir sama.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Di Indonesia, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerus konsep Pusat Belajar Masyarakat telah ada sejak tahun 1960-an. Secara kelembagaan, perintisan di Indonesia dengan istilah PKBM baru dimulai pada tahun 1998, sejalan dengan inisiatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Patut dicatat bahwa terdapat 29 lembaga PKBM di Kota Palopo.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat pembelajaran berupa berbagai jenis keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat pembelajaran berupa berbagai jenis keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan semboyan PKBM, dari, oleh, dan untuk masyarakat, masyarakat tidak lagi secara eksklusif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Namun, perusahaan juga dapat mengembangkan, mendanai, mengelola, dan mengevaluasi kinerja dan pengaruh program pendidikan berdasarkan kebutuhan mereka. Dan karena potensi yang ada di sekitarnya, maka masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini adalah salah satu tempat yang dipilih untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, masyarakat akan memiliki potensi besar yang belum tergali. Misi dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah untuk mengembangkan kesempatan ini untuk perbaikan kehidupan mereka. Untuk mewujudkan potensi tersebut, PKBM berupaya menyesuaikan kegiatan pembelajarannya dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus dibuat secara luas, fleksibel, dan beragam sebagai pusat pendidikan masyarakat. Tersedia untuk semua kelompok umur dan anggota masyarakat sesuai dengan peran, keinginan, minat, dan persyaratan pendidikan

masyarakat. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang ditawarkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbeda-beda berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat.

Fungsi dan Azaz PKBM

Sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dan disusun sesuai dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKBM memiliki tugas kelembagaan yang terkait langsung dengan kehidupan individu (A. Q. Muslim & Suci, 2020; Triyono, 2019). Tujuan tersebut antara lain: a) Sebagai tempat kegiatan belajar bagi anggota masyarakat, yaitu tempat di mana anggota masyarakat dapat memperoleh informasi dan memperoleh berbagai keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. b) Sebagai pusaran pengembangan potensi yang ada di masyarakat, PKBM diantisipasi dapat dimanfaatkan sebagai wadah berbagi potensi yang ada dan yang muncul di masyarakat untuk menciptakan sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. c) Sebagai pusat dan sumber informasi, PKBM merupakan tempat dimana anggota masyarakat dapat bertanya tentang berbagai kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang dibutuhkan masyarakat. PKBM dapat memberikan informasi kepada individu masyarakat yang membutuhkan kemampuan fungsional untuk kecakapan hidup. d) Sebagai wadah pertukaran keterampilan dan pengalaman yang diperoleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan gagasan saling belajar melalui percakapan tentang masalah yang dihadapi. e) Sebagai tempat pertemuan anggota masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilainya untuk kepentingan mereka yang membutuhkan. Juga, ini dapat digunakan untuk pertemuan internal dan eksternal yang berbeda untuk penyelenggara dan individu narasumber. f) Karena PKBM adalah bengkel belajar tanpa henti, maka merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar secara terus menerus.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran PKBM dalam masyarakat adalah memfasilitasi perolehan informasi dan keterampilan melalui kegiatan pembelajaran non formal.

Proses Pembentukan PKBM

Secara konsep, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibuat oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan dan pelaksanaannya menggunakan metode/pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yang prinsip garis besarnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subjek, saling belajar, pemberdayaan masyarakat, mengenai potensi dan kesadaran, rumusan masalah dan menetapkan prioritas, mengidentifikasi solusi masalah, memilih solusi alternatif, merencanakan dan menyajikan rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi (Firman dkk., 2022; Lestari dkk., 2020). Sebagai implementasi prinsip PRA, pembentukan dan penyelenggaraan pembelajaran di PKBM adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Terhadap Masyarakat.

Strategi ini dapat diimplementasikan melalui tokoh desa/kelurahan yang berpengaruh, seperti kiai, ketua RT/RW, lurah/kepala desa, dll. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan masyarakat dengan inisiatif PKBM yang akan datang. Dengan strategi ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan dan sumber daya yang dimilikinya, yang

dapat digunakan untuk mendorong pelaksanaan program. Memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat untuk menentukan sendiri calon penyelenggara sesuai dengan harapan warga masyarakat.

b. Identifikasi Kebutuhan PKBM.

Calon penyelenggara melakukan identifikasi ini dengan pendampingan tokoh masyarakat. Untuk melaksanakan PKBM harus diidentifikasi komponen-komponen pembelajaran sebagai berikut: warga belajar, nara sumber/tutor, fasilitas belajar, tempat belajar, kelompok belajar, dana belajar, dan program pembelajaran.

c. Formulasi Hasil Identifikasi.

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran PKBM, penyelenggara harus memilih tujuan utama yang harus mereka bicarakan dengan tokoh masyarakat.

d. Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk menghindari hambatan selama pelaksanaan kegiatan PKBM, warga belajar harus menyepakati jadwal kegiatan pembelajaran. Kegiatan partisipatif dilakukan dengan partisipasi lembaga afiliasi dan masyarakat.

e. Evaluasi.

Penyelenggara acara dan tokoh masyarakat harus melakukan kegiatan penilaian PKBM. Selain menyadari keberadaan PKBM, sangat penting untuk berdiskusi dengan tokoh masyarakat tentang tantangan yang dialami selama pelaksanaan PKBM dan cara mengatasinya.

Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

Pemerintah kota Palopo belum melibatkan berbagai elemen di dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan. Peneliti memahami bahwa yang dimaksudkan adalah keseimbangan antar unsur yang terkait dengan pendidikan yang belum maksimal.

Kenyataan ini meningdikasikan bahwa pemerintah daerah lebih mempercayakan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan non formal kepada masyarakat. Posisi pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator dan member ruang yang cukup. Sedangkan dari segi pendanaan dan anggaran pendidikan belum tersentuh sebagaimana pendidikan formal.

Namun demikian, perkembangan pendidikan non formal di kota Palopo cukup menjanjikan. Berbagai program dilaksanakan, di antaranya kegiatan pendidikan keaksaraan melalui patroli aksara. Patroli literasi merupakan instrumen penilaian hasil belajar pada pembelajaran literasi yang mengutamakan strategi pelaksanaan non tes. Sepanjang proses penilaian model patroli literasi, hasil belajar warga diukur melalui metode observasi dan wawancara aksesibel dengan warga belajar.

Kegiatan lain yang cukup menarik adalah kegiatan yang terkait dengan pengembangan baca tulis al-Qur'an. Sebagai kota religi, maka partisipasi masyarakat di bidang ini cukup besar, dicanangkan dalam bentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an. Peran pemerintah cukup signifikan di dalam mengawal kelancaran kegiatan dengan memberikan insentif bagi guru mengaji. Saat ini guru mengaji di kota Palopo menerima bantuan insentif guru mengaji dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Keberadaan guru mengaji di Kota Palopo sangat signifikan. Data Kesra Pemerintah Kota Palopo menyebutkan bahwa guru mengaji di Kota Palopo adalah sebanyak 670 orang yang tersebar pada 391 TPA.

Hambatan dalam Pengembangan Pendidikan Non Formal di Kota Palopo

pemerintah kota Palopo untuk tahun 2015 justru mengalokasikan danas sebesar 35 % dari APBD. Ini berarti pemerintah mengalokasikan dana pendidikan lebih tinggi dan melampaui ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya saja, alokasi dana pendidikan masih berfokus pada pendidikan formal. Kadis Pendidikan Kota Palopo, Akram Riza, membenarkan hal tersebut. Akram mengatakan, dari sektor pendidikan, misalnya, masyarakat Kota Palopo sudah merasakan dan menikmati program pendidikan gratis paripurna. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah lanjutan atas (SLTA). ''Ini sudah jalan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Palopo. Di sekolah tidak ada lagi embel-embel pungutan,'' Di tahun 2015 ini, Kota Palopo menjadi satu-satunya wilayah rujukan penerapan program pendidikan gratis di Sulsel. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai petunjuk teknis program pendidikan gratis. Dimana total anggaran pendidikan gratis di tahun 2015 ini sebesar Rp16.310.135.400. Melihat besaran anggaran pendidikan gratis tersebut, tampaknya pemerintah kota Palopo masih lebih berfokus pada pembenahan pendidikan formal.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa; 1) Pelaksanaan pendidikan non formal di Kota Palopo adalah realisasi dari amanat undang-undang yang pelaksanaanya mengacu pada undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah kota Palopo memfasilitasi terbentuknya beberapa lembaga pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar masyarakat, lembaga klursus, Kelompok Belajar serta Taman Pendidikan. 2) Upaya pemerintah kota Palopo dalam melakukan penguatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dapat dilihat dari proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui dinas pendidikan kota Palopo. Walaupun anggaran pendidikan non formal belum sebesar anggaran untuk pendidikan formal, tetapi realisasi kegiatan pendidikan non formal di kota Palopo cukup signifikan. 3) Secara umum, pelaksanaan pendidikan nonformal di kota Palopo berjalan dengan baik. Namun demikian tetap ditemukan hambatan, baik yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya maupun yang bersifat non teknis dalam hal anggaran. Jika menuntut adanya perimbangan alokasi anggaran pendidikan non formal dan pendidikan formal, maka pemerintah daerah belum memberi porsi yang seimbang antara pendidikan formal dan non formal. Hambatan lainnya adalah penataan system evaluasi dari setiap lembaga pendidikan non formal. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pendidikan non formal.

Referensi

Ariandy, M. (2019). Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *3*(2), Art. 2. https://doi.org/10.32533/03201.2019

Darlan, H. M. N. (2018). Melirik Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kotawaringin Timur. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, *3*(2), Art. 2. https://doi.org/10.30870/e-plus.v3i2.4892

Darlis, A. (2017). Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Terhadap Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal dan Formal. *Jurnal Tarbiyah*, *24*(1), Art. 1. https://doi.org/10.30829/tar.v24i1.131

Elihami, E., & Firawati, F. (2017). Transformasi Sosial dalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *1*(2), Art. 2. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v1i2.25

Fadhli, M. (2020). Implementasi Manajemen Strategik Dalam Lembaga Pendidikan. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, *1*(1), Art. 1. https://doi.org/10.51178/ce.v1i1.7

Firman, Hasriadi, Aswar, N., Sukirman, & Yusuf, M. (2022). The Use of Information Technology in Learning in Isolated and Remote Areas: Pioneering, Development, and Modeling. *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, *4*, 268–274.

Hasriadi, H. (2022a). *Strategi Pembelajaran*. Mata Kata Inspirasi.

Hasriadi, H. (2022b). Metode Pembelajaran Inovatif di Era Digitalisasi. *Jurnal Sinestesia*, *12*(1), Art. 1.

Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan*. Gramedia Pustaka Utama.

Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Menangani Permasalahan Sampah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *1*(1), Art. 1. https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30953

Masnuah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *9*(1), Art. 1. https://doi.org/10.36835/modeling.v9i1.1131

Muslim, A. (2022). Pendidikan Spiritualitas Keagamaan Generasi Alfa pada Sekolah Dasar. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *9*(3), Art. 3. https://doi.org/10.36835/modeling.v9i3.1306

Muslim, A. Q., & Suci, I. G. S. (2020). Peran Manajemen Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Peningkata Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Pratama Widya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), Art. 2. https://doi.org/10.25078/pw.v5i2.1855

Mustangin, M., Akbar, M. F., & Sari, W. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan. *International Journal of Community Service Learning*, *5*(3), Art. 3. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i3.38821

Mustangin, M., Iqbal, M., & Buhari, M. R. (2021). Proses Perencanaan Pendidikan Nonformal untuk Peningkatan Kapasitas Teknologi Pelaku UMKM. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, *5*(3), Art. 3. https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.38927

Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning (CJoTL)*, *1*(1), Art. 1.

Sodikin, A. (2019). Kurikulum Dalam Perspektif Mazhab Behaviorisme. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, *15*(2), Art. 2. https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.193

Sunaiyah, N. (2022). Kemampuan Manajerial Ketua Dalam Mengembangkan Pengelolaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif di PKBM Wiyata Bhakti Baros dan Miftahul Huda Pabuaran). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(4), Art. 4.

Triyono, U. (2019). *Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan:(Formal, Non Formal, dan Informal)*. Deepublish.

Wandani, A., & Santi, F. U. (2020). Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Orang Tua Pekerja di Satuan PAUD Sejenis (SPS) Cempaka Kuning, Glondong, Wirokerten. *JSCE: Journal of Society and Continuing Education*, *1*(3), Art. 3. https://doi.org/10.21831/jsce.v1i3.19091

Wijoyo, H. (2021). *Administrasi Pendidikan*. Insan Cendekia Mandiri.

Yahya, M. D. (2017). Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, *12*(1). https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i1.303

Yaqin, A. (2021). *Pendidikan Multi Kultural*. Lkis Pelangi Aksara.